

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Tinjauan Ruang Publik

Ruang publik merupakan salah satu dari elemen kota yang berhubungan dengan bagian-bagian pada lingkungan alami dan binaan, publik dan privat, internal dan eksternal, perkotaan dan pedesaan, di mana masyarakat umum mendapatkan akses secara bebas (Carmona, et al. 2008). Menurut Hakim (1987) ruang publik pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktivitas tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun secara kelompok, dimana bentuk ruang publik ini sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan, serta dapat digunakan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada hari-hari tertentu.

Berdasarkan sifatnya, Hakim (1987) mengklasifikasikan ruang publik menjadi dua yaitu:

- a. Ruang publik tertutup, yaitu ruang publik yang berada di dalam bangunan. Dapat berupa plaza mall atau ruang yang cukup lebar di bangunan pusat perbelanjaan.
- b. Ruang publik terbuka, yaitu ruang publik yang berada di luar bangunan, atau bisa disebut *open space*. Dapat berupa taman, alun-alun, lapangan bermain dan olah raga.

Berdasarkan PERMEN PU NO. 12/PRT/M 2009 sebuah ruang terbuka publik terdiri dari RTNH (Ruang Terbuka Non Hijau) dan RTH (Ruang Terbuka Hijau). Sedangkan pada PERMEN PU No: 05/PRT/M/2008, sebuah ruang terbuka publik kota wajib memiliki perbandingan antara KDH (Koefisien Dasar Hijau) : KDB (Koefisien Dasar Bangunan) sebesar 70% : 30 % hingga maksimal 80% : 20%.

Berdasarkan PERMEN PU No : 05/PRT/M/2008, alun-alun termasuk ruang publik kota yang juga berfungsi sebagai taman kota, sehingga keberadaannya memiliki beberapa kriteria kelengkapan dasar taman kota diantaranya : RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), fasilitas olah raga terbatas, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 30%. Sedangkan semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Secara lebih spesifik PERMEN PU No : 05/PRT/M/2008 menjelaskan dalam tabel berupa :

Tabel 2.1 Standar Ruang Terbuka Publik dengan Konsep Taman Kota

KDH	Fasilitas Standar	Vegetasi
70%-80%	1. Lapangan terbuka 2. Unit lapangan olah raga 3. Trek lari, lebar 7 m panjang 400 m 4. WC umum 5. Parkir kendaraan termasuk sarana kios 6. Panggung terbuka (menampung \pm 100 orang) 7. Area bermain anak 8. Prasarana tertentu: kolam retensi untuk pengendali air larian 9. Kursi.	1. Pohon sedang dan kecil 2. Semak 3. Perdu 4. Penutup tanah

Sumber : PERMEN PU No : 05/PRT/M/2008

2.1.1 Kriteria Ruang Publik

Terdapat kriteria-kriteria tertentu yang harus memenuhi aspek fungsional serta aspek teknis sebuah ruang terbuka publik. Pada aspek fungsional maka hal kritis dari elemen penelitian aspek fungsional harus memenuhi pemisahan fungsi, sirkulasi, serta faktor manusia, sedangkan pada aspek teknis harus memenuhi kesehatan ruang, keselamatan ruang, dan keamanan ruang (Soedibyo, 1989).

Pada aspek fungsional yang berhubungan dengan pengelompokan fungsi, maka akan terlihat fungsi ruang apa saja pada kondisi eksisting, serta kesesuaian fungsi tersebut dalam mewadahi aktivitas pengguna, sehingga harus teridentifikasi elemen pembentuk ruangnya, pelaku aktivitas, jenis aktivitas pengguna, pola aktivitas, serta pola pemanfaatan ruang.

a. Fungsi ruang

Pada Alun-alun kota Malang terdapat 7 fungsi ruang yang pokok, yaitu (DKP Kota Malang, 2015) :

- 1) Zona plasa, berfungsi sebagai area utama untuk menampung berbagai macam kegiatan, dapat berupa pesta rakyat maupun kegiatan formal.
- 2) Zona hijau, yang terdiri dari zona hijau bebas aktivitas, zona hijau untuk sholat, zona hijau steril aktivitas. Zona hijau bebas aktivitas berfungsi sebagai area yang dapat menampung kegiatan bersantai . Zona hijau untuk sholat berfungsi sebagai area yang menampung kegiatan bersantai dan sholat, sedangkan zona hijau steril aktivitas berfungsi hanya sebagai area hijau tanpa adanya aktivitas
- 3) Jalur pejalan kaki, yang terdiri dari jalur pejalan kaki besar dan jalur pejalan kaki kecil. Jalur pejalan kaki besar berfungsi sebagai area untuk menampung sirkulasi dan kegiatan santai, seperti duduk, maupun menampung pesta rakyat. Sedangkan jalur pejalan kaki kecil berfungsi sebagai area sirkulasi dan *jogging track*.

- 4) Zona UKM (Usaha Kecil Menengah), berfungsi sebagai area makan minum dan area berjualan yang telah diizinkan.
- 5) Zona bermain terdiri dari *playground* dan area *skatepark*. *Playground* berfungsi sebagai area bermain, dan *skatepark* berfungsi mewadahi aktivitas *skating*.
- 6) Zona toilet, berfungsi sebagai area cuci kakus bagi pengguna umum.
- 7) Zona rumah sampah, adalah area tanpa aktivitas dikarenakan area ini hanya untuk penyimpanan alat-alat perawatan taman.

b. Konfigurasi ruang

Konfigurasi ruang menurut Carr (1992) berhubungan dengan *space form* atau bentuk ruang. Bentuk ruang ini memengaruhi pengalaman ruang setiap individu yang berhubungan dengan batas-batas ruang di dalamnya, dapat berupa perbedaan level atau material atau susunan *furniture* dan vegetasi

c. Elemen pembentuk ruang

Menurut Rapoport (1982) lingkungan sebagai tempat dalam berkegiatan berkaitan dengan elemen fisik yang membentuknya. Elemen-elemen tersebut baik langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan individu atau kelompok individu dalam suatu lingkungan dalam bentuk perilaku yang dilakukan. Kaitan interaksi yang terjadi antara perilaku dan lingkungannya sebagai suatu komunikasi nonverbal yang memiliki arti. Rapoport kemudian membagi elemen-elemen *setting* fisik dilihat dari material pembentuknya menjadi 2 macam, yaitu

- 1) *Fixed-feature element*. Merupakan suatu elemen fisik yang bersifat tetap atau dia dapat berubah secara lambat dan jarang atau dalam jangka waktu yang lama (Rapoport, 1982). Pada objek alun-alun yang dijadikan objek penelitian, hal ini terdiri dari: elemen bangunan, elemen atraktif, *furniture* ruang, *pedestrian ways*, tata taman dan tata hijau, sistem penanda, dan elemen dekorasi.
- 2) *Semi fixed-feature element*. Merupakan elemen yang bersifat semi tetap merupakan suatu elemen yang dapat berubah secara cepat dan mudah. Pada objek alun-alun yang dibuat penelitian, terdiri dari area parkir dan vegetasi.

d. Pelaku aktivitas

Berdasarkan Wulandari (2007), terdapat dua jenis pelaku aktivitas yang terlihat dalam alun-alun kota Malang, yang terdiri dari pengguna tetap dan pengguna tidak tetap.

Pengguna tetap adalah pelaku aktivitas yang memanfaatkan waktunya secara lama berada pada area publik, biasanya dalam rangka mencari nafkah, sedangkan pengguna tidak tetap adalah pengunjung biasa yang terdiri dari pengunjung dewasa, remaja, anak-anak, serta pengunjung difabel.

e. Jenis aktivitas

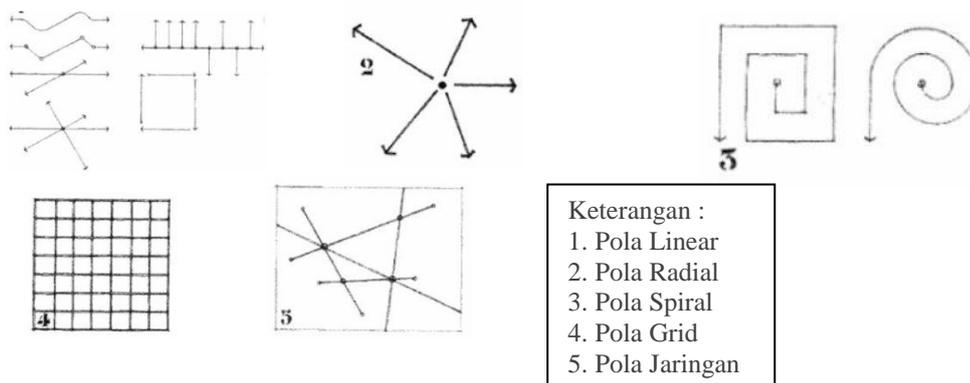
Carr (1992), menyebutkan berbagai jenis kegiatan berdasarkan jenis keterlibatannya terhadap ruang diantaranya:

- 1) Aktivitas aktif, yaitu aktivitas yang terjadi dengan bersaamaan dengan munculnya interaksi sosial antara dua orang atau lebih. Keegiatannya secara langsung atau sadar melibatkan suatu seting tertentu untuk digunakan. Aktivitas ini membutuhkan gerakan yang lebih banyak daripada aktivitas pasif. Contohnya adalah olahraga di lapangan terbuka, jogging, bermain di *Playground*, *skating*, dan sebagainya.
- 2) Aktivitas pasif, yaitu jenis aktivitas yang kegiatannya tersebut secara langsung dilakukan saat berada di suatu ruang publik dan sifatnya secara tidak langsung/ sadar melibatkan suatu kepentingan aktivitas tersebut. Contohnya adalah duduk-duduk, tiduran/ berbaring santai atau berdiri melihat pemandangan.

f. Pola aktivitas

Setelah setiap dari aktivitas yang teridentifikasi, maka akan membentuk pola kegiatan, atau pola aktivitas. Pola aktivitas yang terbentuk pada setiap fungsi dari ruang akan dapat memperlihatkan bagaimana pengguna sebuah ruang menempati ruang tersebut, sehingga terlihat area mana yang sering terpakai dan apakah ada area yang jarang terpakai ataupun tidak tergunakan (Soedibyo, 1989). Pola aktivitas tersebut terdiri dari pola-pola yang dijelaskan dalam Ching (2007), yang terdiri dari :

- 1) Pola linear, yaitu pola yang lurus, namun dalam bentukannya dapat juga berliuk-liuk dan membentuk curva, maupun terpotong-potong.
- 2) Pola radial, terbentuk dari pola-pola linear yang berjumlah lebih dari satu dan memanjang dari atau berakhir pada sebuah pusat.
- 3) Pola spiral, merupakan sebuah pola linear yang memanjang atau berakhir pada satu titik pusat, yang kemudian bergerak melingkar mengelilingi pusatnya.
- 4) Pola grid. Pola grid membentuk sebuah bentukan yang teratur, yang apabila diterik garis dapat membentuk sebuah bujur sangkar.
- 5) Pola jaringan. Pola jaringan terbentuk dari lebih dari satu pola linear yang kemudian saling berhubungan secara acak, dan tidak seteratur pola grid.



Gambar 2.1 Macam-macam Pola Aktivitas dan Sirkulasi
Sumber: Ching (2007)

g. Pola pemanfaatan ruang

Pola pemanfaatan ruang bagaimana individu-individu di dalam sebuah ruang memiliki kecenderungan-kecenderungan perilaku dalam beraktivitas dalam memanfaatkan seting-seting fisik ruang yang ada, sehingga diketahui adanya indikasi-indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada suatu lingkungan atau ketidaksesuaian lingkungan fisik dalam mengakomodasi suatu aktivitas (Soedibyo, 1989).

Pada aspek fungsional yang berhubungan dengan sirkulasi, maka akan terlihat apa saja jalur sirkulasi di area eksisting, serta bagaimana kesesuaian area sirkulasi itu dalam mewadahi sirkulasi pemakainya. Hal ini membutuhkan observasi mengenai bagaimana aksesibilitas serta konfigurasi ruang di area ruang publik, yang akan menunjukkan pencapaian menuju area tujuan, pola sirkulasi pengguna, pola perpindahan ruangnya, sehingga dapat mengevaluasi apakah ada kesalahan-kesalahan dalam perancangan sirkulasi yang membuat adanya ruang yang tak terlewati dan sepi pengguna.

a. Aksesibilitas

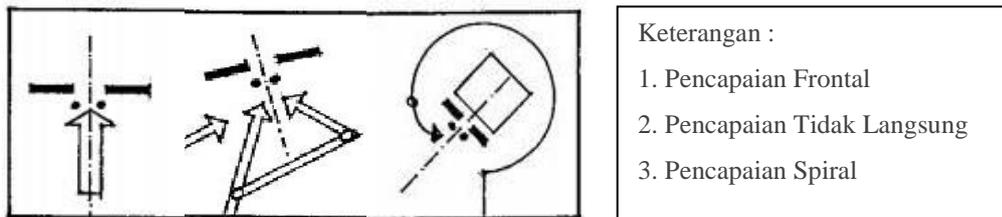
Menurut *Project for Public Spaces* (1975), aksesibilitas berhubungan dengan pencapaian dari luar ke dalam ruang terdapat beberapa hal yang dikaji, yaitu

- 1) Letak *entrance* yang dapat terlihat dari kejauhan
- 2) Bentuk *entrance* yang dapat dilalui untuk sirkulasi, berhubungan dengan pencapaian.
- 3) Jalur sirkulasi menuju ruang dari area *entrance*

b. Pencapaian menuju ruang

Pencapaian menuju ruang dapat memperlihatkan akses mana saja yang digunakan setiap individu dan bagaimana cara individu dalam mencapai ruang. Hal ini menghubungkan perpindahan antara ruang luar menuju ruang dalam yang terjadi pada setiap individu. Ching (2007) membagi pencapaian menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Pencapaian frontal adalah pencapaian yang mengarah langsung menuju pintu melalui jalur lurus dan aksial segaris dengan sumbu bangunan dengan tujuan jelas.
- 2) Pencapaian tersamar atau pencapa
- 3) ian tidak langsung adalah pencapaian yang lebih menekankan efek perspektif dan vista lingkungan sekitar daripada pintu masuk utama sendiri, sehingga lebih bisa memperlihatkan keadaan pada fasad-fasad dan bentuk sebuah bangunan atau area.
- 4) Pencapaian spiral adalah pencapaian yang dapat memperlambat tahap pencapain dan menekankan pandangan ke bentuk tiga dimensi suatu area dikarenakan individu diharuskan mengikuti alur yang memutari objek utama.



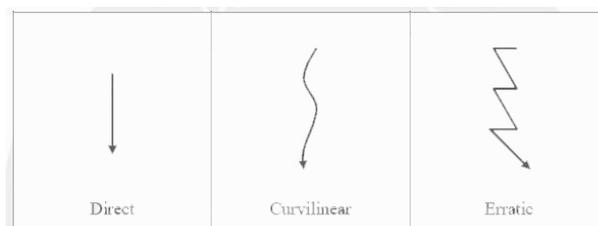
Gambar 2.2 Pencapaian Menuju Bangunan
Sumber: Ching (2007)

c. Pola sirkulasi

Keleluasan gerak secara fisik pada ruang sirkulasi ditentukan oleh dimensi ruang. Meliputi lebar dan tinggi ruang sirkulasi, sudut tikungan, kemiringan, dan keamanan dalam bergerak. Elemen-elemen visual bidang yang didefinisikan ruang sirkulasi membentuk respon pada subjek yang bergerak dan pengarah dibutuhkan agar subjek tidak kehilangan orientasi. Sedangkan untuk memicu terjadinya gerakan, pola sirkulasi memegang peranan penting. Beberapa pola sirkulasi manusia menurut Simond (1961):

- 1) Pola sirkulasi *direct* adalah pola sirkulasi yang mengarah langsung dan hanya memberi satu pilihan ke tujuan akhir. Akses visual yang diterima oleh pengunjung adalah tujuan akhir ke ruang yang dituju.

- 2) Pola sirkulasi *curvilinear* adalah garis linear yang berliku-liku halus dan memberi satu pilihan ke tujuan akhir. Pada pola sirkulasi ini akses visual ke tujuan akhir kurang jelas dan memberi kesan mengalir.
- 3) Pola sirkulasi *erractic* adalah pola sirkulasi yang terpatah-patah. Akses visual ke tujuan akhir kurang jelas.

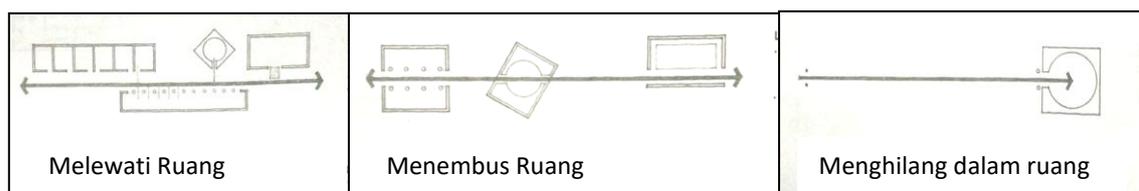


Gambar 2.3 Pola Sirkulasi Manusia
Sumber: Simond (1961)

d. Pola perpindahan ruang

Dalam melakukan pergerakan di alun-alun, masyarakat dapat menggunakan jalur pedestrian yang telah disediakan, dan atau memotong lajur dengan menembus ruang seperti pada zona hijau. Pola pergerakan manusia dapat dikategorikan sesuai dengan Ching (2007) menjadi tiga yaitu :

- 1) Melewati Ruang, yaitu suatu pola pergerakan manusia yang apabila integritas setiap ruang dipertahankan, sehingga pergerakannya berada pada lajur yang dihimpit oleh ruang-ruang.
- 2) Menembus Ruang, yaitu suatu pola pergerakan manusia yang apabila sebuah ruang dilewati sebuah jalur secara aksial, miring atau di sepanjang tepinya, dan ketika menembusi ruang, jalur menciptakan pola-pola peristirahatan dan pergerakan di dalamnya.
- 3) Menghilang di dalam Ruang, yaitu suatu pola pergerakan manusia yaitu apabila jalur pergerakannya tertahan di dalam ruang sehingga hanya digunakan untuk memasuki ruang dan kembali dari ruang tersebut.



Gambar 2.4 Pola Perpindahan Ruang
Sumber: Ching (2007)

Pada aspek fungsional yang berhubungan dengan faktor manusia, maka didalamnya akan terlihat kesesuaian fasilitas, dan ukuran yang berhubungan dengan standar-standar perancangan. Pada hal ini dibutuhkan kejelasan-kejelasan bentukan ruang dan elemen fisik di dalamnya (Soedibyo, 1989).

Dikarenakan aspek faktor manusia yang dikaji pada ruang terbuka publik membutuhkan setting fisik untuk dibandingkan dengan standar, sehingga pembagian elemen pembentuk ruang yang akan dikaji menggunakan Rapoport (1982) yang terdiri dari elemen tetap (*fixed-feature element*) dan element semi tetap (*semi fixed-feature element*).

a. *Fixed-feature element*

Elemen tetap pada ruang terbuka publik terdiri dari: elemen bangunan, elemen atraktif, *furniture* ruang, *pedestrian ways*, tata taman dan tata hijau, sistem penanda, dan elemen dekorasi. Sedangkan standar elemen tetap menurut Permen PU NO. 12/PRT/M 2009 dibagi menjadi tiga elemen utama ruang terbuka publik, yang terdiri dari: elemen bangunan berupa plaza dan *pedestrian ways*, elemen atraktif yang terdiri dari area bermain, tata taman dan elemen pendanda dan elemen dekorasi yang terdapat pada *furniture* ruang, serta perabot opsional berupa kios UKM.

1) Plaza

Pada Alun-alun kota Malang, plaza yang didesain merupakan perpaduan antara plaza untuk ruang perkotaan dan plaza amphiteater (DKP Kota Malang, 2015), sehingga standar dari area ini merupakan percampuran dari keduanya. Secara umum, area plaza perkotaan yang pada hal ini adalah alun-alun dapat dikategorikan sebagai plaza *conurbation*, yang mana memiliki luasan yang tidak ditentukan, dan disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas masyarakat ataupun perancangan ruang (Permen PU NO. 12/PRT/M 2009). Secara umum standar fasilitas plaza adalah harus terdapat adanya fasilitas-fasilitas umum, dan untuk difabel. Fasilitas umum berupa:

- a) Area-area dudukan
- b) Area taman dan hiasan air
- c) Rak sepeda
- d) Tiang bendera
- e) Lampu penerangan
- f) Tempat sampah

Keseluruhan dari fasilitas-fasilitas di atas harus dapat digunakan oleh keseluruhan kalangan pengguna alun-alun, termasuk kaum difabel. Sedangkan standar sebuah plaza amphiteater menurut De Chiara, 1983, sebuah amphiteater terbuka harus memiliki:

- a) Panggung utama dengan ukuran minimal 100m^2
- b) Panggung samping dengan ukuran menyesuaikan
- c) Tribun dengan tinggi antar pijakannya adalah 40cm-45cm
- d) Ruang ganti dengan ukuran $12\text{m}^2/4$ orang
- e) Ruang perlengkapan
- f) Kamar mandi

2) Area bermain

Area bermain pada Alun-alun kota Malang termasuk area bermain umum yang bercampur dengan area olah raga dan arena hobi berupa *skatepark* untuk ruang terbuka publik (DKP Kota Malang, 2015). Arena bermain campuran jenis ini secara teknis termasuk area bermain yang tidak ditentukan luasannya (*conurbation*), dan disesuaikan dengan perletakan sistem lingkungan tertentu (Permen PU NO. 12/PRT/M 2009).

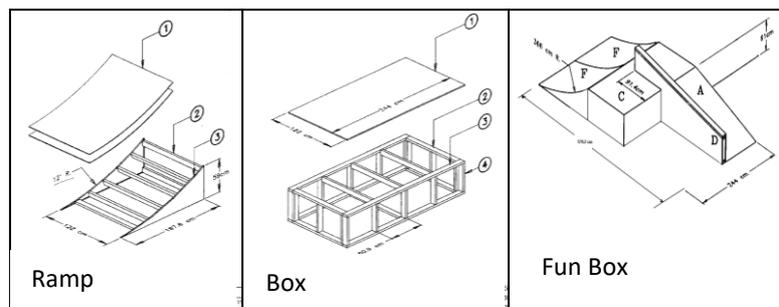
Menurut Baskara (2011), fasilitas yang ada pada area bermain harus dapat digunakan untuk berbagai kalangan anak-anak, baik itu pria dan wanita maupun anak-anak yang mengalami keterbatasan fisik. Berdasarkan CPSC (1981), terdapat fasilitas standar yang harus ada dalam taman bermain publik dibagi menjadi lima jenis, yaitu :

- a) Dudukan
- b) Area lapang untuk aktivitas bermain umum
- c) Fasilitas khusus area bermain, yang terdiri dari
 - i. Ayunan
 - ii. Perosotan
 - iii. Papan jungkat-jungkit
 - iv. Alat bermain panjat

Keseluruhan dari fasilitas bermain diletakkan dengan jarak paling minimal adalah 6ft atau 1,8m. Adapun standar fasilitas zona *skatepark* menurut Gembeck (2000) adalah harus terdapatnya fasilitas-fasilitas yang mayoritas ada pada *skatepark*, yaitu :

- a) Terdapatnya fasilitas *rest area* atau plaza yang dapat digunakan untuk para penonton atau para pemain lain untuk istirahat ataupun melihat aktivitas skating secara langsung tanpa terhalang oleh aktivitas lainnya.

- b) Terdapat *obstacle* khusus permainan pada area *skatepark* yang terdapat fasilitas minimal yang harus ada berupa ramp/ *launch ramp* dengan ukuran minimal P=167,8cm, L=122cm, tinggi dari luncurannya adalah 59cm, kemudian box (*obstacle* datar) dengan ukuran P=244cm, L=122cm dan fun box (gabungan ramp dan *obstacle* datar) dengan luas minimal adalah 33,5m² serta area datar untuk landasan skater dengan jarak bersih tanpa *obstacle* adalah 3,04m



Gambar 2.5 Jenis-jenis *Obstacle Skatepark*
Sumber: Gembeck (2000)

3) *Pedestrian ways*

Jalur pejalan kaki menurut Permenpu No : 03/PRT/M/2014 adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan atau fasilitas pergantian moda. Sarana dan prasarana di dalamnya harus bisa digunakan baik oleh pengguna jalan pada umumnya, maupun pengguna difabel. Pada ruang terbuka publik, fasilitasnya mencakup umum dan difabel. Fasilitas umum berupa:

- a) Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal adalah 120cm
- b) Dudukan
- c) Lampu penerangan
- d) Jalur hijau atau pot bunga
- e) Tempat sampah
- f) *Signage*

Berdasarkan pemanfaatannya selain untuk kebutuhan berjalan oleh pejalan kaki, aktivitas yang diperbolehkan pada prasarana jaringan pejalan kaki adalah aktivitas bersepeda, interaksi sosial, KUKF (Kegiatan Usaha Kecil Formal), Aktivitas pameran di ruang terbuka, penyediaan jalur hijau (peneduh), dan aktivitas penyediaan perabot jalan dan jaringan utilitas, dengan rincian :

- a) Segala jenis kegiatan yang diperbolehkan pada sarana jaringan pejalan kaki tidak boleh mengganggu aktivitas berjalan
 - b) Pada jalur pejalan kaki yang memiliki lebar 5 m dapat mengakomodasi kegiatan bersepeda/ KUKF/ Aktivitas pameran dengan lebar maksimal 3m atau dengan perbandingan jalur pejalan kaki : jalur pesepeda adalah 1 :1,5.
 - c) Pada jalur pejalan kaki yang didesain mengakomodasi kegiatan interaksi sosial harus menyediakan area istirahat bagi pejalan kaki.
- 4) *Furniture* ruang (penerangan, pot bunga, tempat sampah) (Permenpu No : 03/PRT/M/2014) :
- a) Fasilitas penerangan :

Lampu penerangan pada ruang terbuka tidak memiliki peraturan khusus pada seberapa besar lux untuk tingkat penyinaran, namun diusahakan untuk dapat mengakomodasi area-area vital. Sedangkan sebaiknya lampu penerangan terletak di luar ruang bebas jalur pejalan kaki dengan jarak antar lampu penerangan yaitu 10 meter dengan material tahan lama dan memiliki durabilitas tinggi.
 - b) Fasilitas dudukan :
 - i. Terdapat tempat duduk pada ruang terbuka publik dengan jarak minimal setiap 10 meter.
 - ii. Ukuran dudukan minimal adalah 120 x 60cm, t=45cm serta menggunakan material yang memiliki durabilitas tinggi seperti metal dan beton cetak
 - c) Jalur hijau dan pot bunga

Jalur hijau terletak di luar ruang bebas jalur pejalan kaki dengan ukuran minimal 1,5m. Pot bunga menggunakan dimensi yang disesuaikan kebutuhan ruang hanya saja peletakkannya diluar dari jalur sirkulasi dibuat serta menggunakan material yang memiliki durabilitas tinggi.
 - d) Fasilitas tempat sampah :

Tempat sampah terletak di luar ruang bebas jalur pejalan kaki dengan jarak antar tempat sampah yaitu 20 meter. Tempat sampah dibuat dengan dimensi sesuai kebutuhan, serta menggunakan material yang memiliki durabilitas tinggi seperti metal maupun beton cetak.

5) Zona UKM

Berdasarkan PERMEN PU No : 03/PRT/M/2014, zona UKM yang didalamnya terdapat kios serta area-area dudukan merupakan sebuah sarana dan prasarana yang dapat mengurangi kelelahan orang berjalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008, fasilitas yang harus ada agar dapat terselenggaranya area UKM dengan baik maka harus terdapat fasilitas antara lain:

- a) Kios, dengan luasan kios minimal adalah 3m^2 dan level lantai kios setinggi 40cm
- b) Memiliki dudukan dan meja dengan luas meja minimal adalah $1,5\text{m}^2$
- c) Memiliki atau berdekatan area parkir kendaraan yang terdiri dari kendaraan roda dua dan roda empat.
- d) Terdapat sarana pendukung pada area sekitarnya yaitu :
 - i. Musholla
 - ii. Toilet
 - iii. Sarana dan prasarana penampungan sampah (bak sampah)

6) Zona Toilet

Berdasarkan Permenpu NOMOR : 30/PRT/M/2006, toilet merupakan salah satu fasilitas yang harus tersedia dalam fasilitas pelayanan umum. Fasilitas dalam toilet sendiri terdiri dari :

- a) Toilet pria berukuran P = 80-90cm, L = 150-160cm, T minimal = 220-240cm
- b) Toilet wanita berukuran P= 80-90cm, L = 150-160cm, T minimal = 220-240cm
- c) Terdapat area khusus untuk buang air besar
- d) Terdapat urinoir pada toilet pria dengan ukuran L = 70-80cm, T = 40-45cm
- e) Terdapat wastafel pada area toilet wanita, pria dan difabel
- f) Terdapat tempat sampah, pada area toilet wanita, pria, dan difabel.

b. Semifixed-feature element

Elemen yang bersifat semi tetap pada ruang terbuka publik terdiri dari area parkir dan vegetasi (Rapoport, 1982).

1) Area parkir

Berdasarkan PERMEN PU NO. 12/PRT/M 2009, area parkir merupakan sebuah area sebagai tempat singgah sementara dari keadaan tidak bergerak suatu kendaraan karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Dalam ruang terbuka publik area parkir

termasuk dalam ukuran *conurbation* atau memiliki kebutuhan yang tidak ditentukan, sehingga luasannya dapat menyesuaikan wilayah yang akan digunakan.

Secara umum, area parkir harus memenuhi kriteria standar berupa (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96) :

- a) Area parkir dapat terdiri dari parkir roda empat dengan, parkir roda dua, dan parkir khusus (ambulan, maupun difabel), disesuaikan kebutuhan.
- b) Area parkir tidak menutupi jalur masuk menuju area utama.
- c) Terdapat batas yang jelas, dapat berupa marka, perambuan dan batas lainnya antara parkir roda dua, roda empat dan parkir khusus.
- d) Mudah dicapai dari jalan raya dan jalan utama.
- e) Kebutuhan parkir, kendaraan adalah $3\% \times$ area yang dilayani
- f) SRP mobil 2,3m x 5m
- g) SRP sepeda motor 0,75m x 2m

Area parkir tidak hanya digunakan untuk parkir kendaraan saja, pada saat-saat insidental, area parkir dapat digunakan untuk (PERMEN PU NO. 12/PRT/M 2009):

- a) Lapak PKL pada saat hari libur atau malam hari disaat sepi.
- b) Aktivitas massal, seperti upacara, pameran dan aktivitas peribadatan.
- c) Area darurat atau area berkumpul apabila terjadi bencana atau kecelakaan pada area yang berdekatan dengan parkir tersebut.

Pada aspek teknis yang meliputi keamanan ruang, maka elemen-elemen fisik di dalam ruang terbuka publik harus memiliki keamanan pada setiap aspek fisik yang ada. Hal ini mencakup keamanan pada elemen tetap, dan juga elemen semi tetap pada perancangan alun-alun.

a. Keamanan ruang

Pada aspek teknis, keamanan ruang yang diteliti mengacu pada elemen-elemen dalam ruang terbuka publik yang terdiri dari elemen tetap, dan elemen semi tetap.

1) Elemen tetap

Secara umum standar keamanan pada ruang terbuka publik adalah berhubungan dengan ketersediaan fasilitas penunjang keamanan, seperti pos pengaman, perangkat CCTV serta personil aktif yang dapat menjaga keamanan apabila terjadi tindak kriminal ataupun hal merugikan di dalam area tersebut (PERMEN PU NO. 12/PRT/M 2009).

Selain keamanan secara umum, terdapat pula keamanan secara khusus yang tertuju pada elemen-elemen tertentu pada ruang terbuka publik, diantaranya adalah:

- a) Area plasa (PERMEN PU NO. 12/PRT/M 2009)
 - i. Penataan wilayah yang memungkinkan kemudahan bagi keamanan untuk mengawasi area plasa
 - ii. Keleluasaan dalam bergerak bagi setiap pengunjung serta bagi petugas keamanan dalam mengakses lokasi

- b) *Pedestrian Ways* (PERMEN PU NOMOR : 03/PRT/M/2014)
 - i. Keberadaan dari fasilitas penjagaan pada area *entrance* dari pedestrian
 - ii. Keleluasaan bergerak bagi pengunjung umum dan pengunjung difabel.

- c) Area UKM (PERMENDAG Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008)

Lokasi dari zona UKM sebaiknya harus memudahkan pengguna untuk segera menuju pada area area UKM dari area parkir.

- d) Area bermain (Baskara, 2011)
 - i. Akses masuk area bermain harus dibatasi jumlah jalan masuknya untuk menghindari gangguan fisik dari area luar serta, ancaman kriminalitas, setidaknya maksimal hanya terdapat dua pintu masuk menuju area bermain.
 - ii. Taman bermain harus terlindungi pagar yang membatasi pergerakan masuk ataupun keluar taman bermain.
 - iii. *Layout* area bermain harus memudahkan penjaga untuk dapat mengawasi dengan mudah anak-anak yang bermain (terdapat area dimana penjaga dapat melihat langsung kondisi anaknya tanpa terdapat penghalang visual)

2) Elemen semi tetap

Keamanan pada elemen semi tetap meliputi keamanan pada area parkir. Secara umum, keamanan dalam fasilitas perparkiran diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96, yang meliputi:

- i. Lokasi parkir yang memiliki keamanan tinggi sebaiknya menggunakan jenis *off parking* dan terpusat pada suatu daerah dengan penjagaan khusus
- ii. Terdapatnya fasilitas CCTV pada area sekitarnya
- iii. Lokasi dari area parkir harus terlihat dari jalan terdekat

- iv. Lokasi parkir harus sedekat mungkin dengan pusat kegiatan yang dilayani

b. Keselamatan

Keselamatan pada aspek teknis ruang terbuka publik mengacu pada elemen tetap dan elemen semi tetap.

1) Elemen tetap

a) Plasa (PERMEN PU NO. 12/PRT/M 2009)

- i. Terdapat tonggak-tonggak pembatas antara area plasa dengan area jalan sekitar yang bertujuan mencegah kendaraan umum masuk ke dalam plasa.
- ii. Menghindari peletakan bak kontrol dalam area plasa yang berdekatan dengan jalan masuk, maupun di area depan jalan masuk.
- iii. Terdapatnya instalasi pemadam kebakaran pada area sekitar plasa.
- iv. Material alami baik untuk alas, diantaranya beton, perkerasan batu bata, paving block granit, paving block aspal, elemen pracetak, dan paving semen
- v. Menggunakan elemen alami pada fasilitas lainnya seperti dudukan dan pembatas taman.

b) *Pedestrian ways* (NOMOR : 03/PRT/M/2014)

- i. Terletak pada area yang aman dari lalu lintas kendaraan umum.
- ii. Terdapatnya rambu penyeberangan dan *zebra cross* penyeberangan dari area-area sekitar.
- iii. Menghindari berbagai bahaya yang berpotensi mengancam keselamatan seperti jeruji dan lubang termasuk peletakan utilitas yang membahayakan.
- iv. Area jalan yang tanpa rintangan vegetasi maupun rintangan lainnya
- v. Permukaan jalan tidak licin dan halus. Diantaranya dapat menggunakan balok paving, balok bata, maupun aspal
- vi. Ruang pejalan kaki terpisah dari jalur lalu lintas kendaraan dan memiliki ketinggian maksimal 20cm lebih tinggi dari sirkulasi kendaraan.
- vii. Ramp dan marka terletak pada lokasi yang aman dari sirkulasi kendaraan.
- viii. Material untuk dudukan tepi pedestrian harus material yang memiliki durabilitas tinggi diantaranya adalah besi maupun balok beton.
- ix. Material lampu penerangan dan tempat sampah memiliki durabilitas tinggi, dapat menggunakan beton, metal maupun material lainnya.

c) Area bermain *playground* (Baskara, 2011)

- i. Lokasi area bermain memanfaatkan ruang terbuka publik yang tidak membahayakan keselamatan (tidak berada pada area yang berdekatan dengan perlintasan ramai, pada area yang terdapat lubang dan sebagainya).
- ii. Penempatannya seminimal mungkin anak-anak tidak terganggu saat menuju area bermain (dekat dengan area parkir, jauh dari lalu lintas ramai).
- iii. Terdapat pagar yang tidak mudah dipanjat anak-anak. (desain tanpa pijakan yang bisa digunakan sebagai area panjat kaki)
- iv. Tata letak area bermain dibedakan fasilitas untuk aktivitas yang aktif dan pasif serta memiliki fasilitas berdasarkan perbedaan umur.
- v. Peletakan fasilitas permainan harus menghindari benturan antara anak-anak dengan fasilitas yang bergerak, seperti ayunan ataupun jungkat-jungkit.
- vi. Area alas permainan harus menggunakan bahan yang meredam benturan saat anak jatuh dari fasilitas permainan (terdapat matras keras, karpet maupun instalasi peredam benturan lainnya).
- vii. Peralatan permainan harus memiliki perlindungan independen apabila alat itu punya ketinggian dari alas (pagar pengaman independen per fasilitas).
- viii. Area sirkulasi sekitar fasilitas bermain harus ditata dengan lebar sehingga mampu menampung kursi roda dan pejalan kaki umum secara bersamaan
- ix. Sambungan peralatan permainan harus meminimalisasi adanya tonjolan yang membahayakan yang dapat melukai dengan sudut lancip atau siku.
- x. Setiap fasilitas permainan harus didesain tanpa adanya area sempit yang dapat membuat tubuh anak-anak terjepit.
- xi. Bahan yang bersentuhan dengan kulit anak-anak harus bertekstur halus
- xii. Bahan pijakan terdapat penahan slip atau didesain untuk menahan slip saat menaiki area permainan
- xiii. Area pojokan harus memiliki desain melengkung dan dihindari bentukan yang membentuk sudut.

d) Area *skatepark* (Gembeck, 2000)

- i. Lokasi berada pada area tersendiri yang seminimal mungkin tidak membahayakan dan mengancam keselamatan bagi masyarakat di sekitarnya.
- ii. Peletakan fasilitas dan orientasi rintangan pada *skatepark* berdasarkan pergerakan/ sirkulasi manusia dan tidak diletakkan secara acak.

- iii. Terdapat penerangan yang menerangi area secara merata
- iv. Terdapat pembatas bagi area yang berhubungan dengan area ramai, dapat berupa pagar dan dinding, ataupun area berjarak, seperti jalur hijau atau plaza yang dapat mencegah pengunjung sekitar berbenturan dengan pemain.

e) Utilitas

- i. Keselamatan utilitas penangkal petir (SNI 03-3990-1995)
Lokasi penangkal petir pada area yang mencakup setiap radius 30m.
- ii. Keselamatan sistem plambing (SNI 03-7065-2005).
 - Instalasi sistem plambing berupa air bersih dan buangan berada di bawah tanah dengan kedalaman minimal 1,5m
 - Alat plambing diletakkan pada area diluar jalur sirkulasi manusia maupun kendaraan, serta tidak terlalu dekat dengan pohon.

2) Elemen semi tetap

a) Area parkir (KepDirJend Perhubungan Darat No 272/HK.105/DRJD/96 dan PermenPU no 12 tahun 2009):

- i. Area parkir harus berada pada area yang tidak harus menyeberangi jalan ramai dalam menuju area fasilitas yang dilayani
- ii. Area parkir harus terdapat *parkir booth* sebagai area pembatas depan.
- iii. Terdapat penerangan yang seimbang pada area-area yang gelap.
- iv. *Layout* parkir dapat tegak lurus, sejajar, ataupun miring dengan sudut kemiringan 45° dengan tanpa adanya parkir ganda yang menutup sirkulasi
- v. Lokasi rea parkir harus berada di tempat datar
- vi. Terdapat marka atau *signage* pelarangan area parkir pada area-area :
 - 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki.
 - 25 meter sebelum dan sesudah tikungan beradius kurang dari 500 meter.
 - Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan.
 - Sepanjang area yang berpotensi kemacetan dan bahaya.

b) Vegetasi (PERMEN PU No : 05/PRT/M/2008)

- Kepastian vegetasi di area publik tidak menghalangi pandangan (tajuk pohon tidak setinggi pandangan manusia dan menghalangi pandangan).

- Kepastian vegetasi di area publik tidak menghalangi sirkulasi pada pengguna ruang publik.

c. Kesehatan

Kesehatan pada ruang publik meliputi kesehatan pada elemen tetap dan elemen semi tetap. Pada elemen tetap meliputi kesehatan pada ruang terbuka publik berupa area bermain. Sedangkan pada elemen semi tetap berupa kesehatan pada elemen vegetasi.

1) Elemen tetap

a) Area plasa (PERMEN PU NO. 12/PRT/M 2009)

- i. Penempatan area pembuangan ataupun tempat sampah yang tidak berdekatan dengan area duduk
- ii. Penempatan area air air mancur dan elemen air tidak berdekatan dengan area dudukan
- iii. Ukuran kemiringan dari landasan plasa kurang lebih 2% menuju ke arah drainase

b) Area bermain (Baskara, 2011)

- i. Area bermain tidak ditempatkan pada area yang memiliki aspek kesehatan rendah yaitu berupa polusi udara, polusi air, polusi bau, polusi suara yang dapat memengaruhi aktivitas bermain anak.
- ii. Lokasi harus menghindari area yang sensitif terhadap suara yang ditimbulkan anak-anak bermain.
- iii. Material yang digunakan tidak menimbulkan racun bagi anak-anak
- iv. Material pelindung karat harus terdiri dari material yang kuat dan tidak mudah mengelupas sehingga tak mencemari lingkungan.

c) Area toilet (Permen PU NOMOR : 30/PRT/M/2006)

- i. Dinding menggunakan keramik, gypsum atau bata dengan lapisan tahan air.
- ii. Langit-langit harus terbuat dari lapisan kaku dengan rangka yang kuat.

2) Elemen semi tetap berupa vegetasi. Berdasarkan PERMEN PU No : 05/PRT/M/2008, kriteria vegetasi untuk taman kota dan ruang terbuka publik harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Tajuk rindang dan kompak.

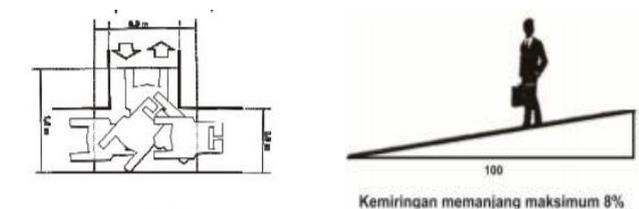
- b) Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang.
- c) Jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal.
- d) Warna hijau dengan variasi warna seimbang

2.1.2 Ruang Publik yang Mengakomodasi Difabilitas

Berdasarkan PERMEN PU NO. 30 /PRT/2006, sebuah tata lingkungan yang baik apabila tata lingkungan tersebut dapat mengakomodasi difabilitas sehingga mewujudkan kesamaan, kesetaraan, dan peningkatan peran penyandang cacat dan lansia yang memadai, yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat dan lansia. Tata lingkungan tersebut mencakup area ruang terbuka publik.

Di dalam ruang terbuka publik, terdapat beberapa aspek umum yang harus diperhatikan, diantaranya :

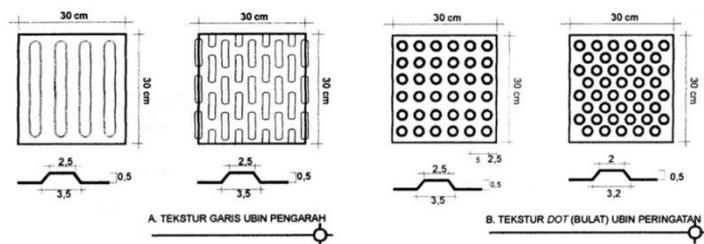
- a. Jalur pedestrian; Selain syarat umum, sebuah jalur pejalan kaki juga harus memiliki standar fisik jalur pejalan kaki yang menyesuaikan kebutuhan bagi pejalan kaki difabel, diantaranya: (PERMEN PU No : 03/PRT/M/2014)
 - 1) *Pedestrian* yang mengakomodasi difabel harus memiliki lebar minimal 1,5m.
 - 2) Alinemen jalan mudah dikenali pejalan kaki antara lain dengan penggunaan jalur pemandu untuk difabel sehingga dapat digunakan oleh penyandang difabilitas
 - 3) Kelandaian maksimal adalah 8% atau satu banding dua belas.



Gambar 2.6 Standar Pedestrian Untuk Difabilitas
Sumber: PERMEN PU No : 03/PRT/M/2014

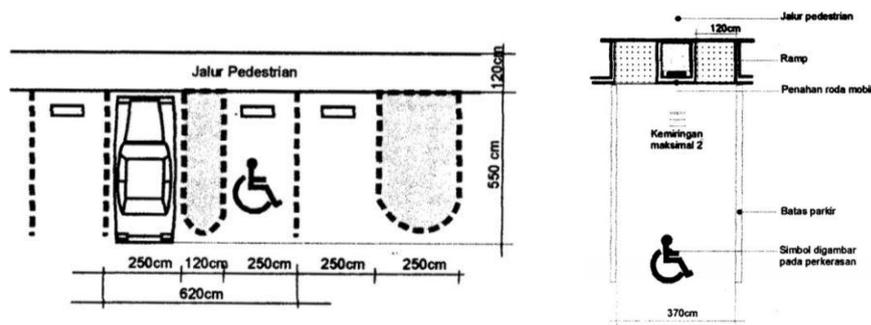
- b. Jalur pemandu; Penggunaan jalur pembantu ditujukan untuk mempermudah penyandang difabel terutama tuna netra, dan tuna daksa. Memiliki syarat tertentu berhubungan dengan keselamatan pengguna: (PERMEN PU NO. 30 /PRT/2006)
 - 1) Lokasi dan tujuan jalur pemandu harus berada pada area :
 - a) Lokasi utama jalur pemandu harus berada pada area masuk dan keluar dari fasilitas yang dilayani
 - b) Lokasi sekunder dari jalur pemandu berada pada area peta situasi/rambu, kamar kecil/toilet umum, tangga, ram, tempat parkir, dan tempat angkutan umum.

- 2) Layout jalur pemandu harus berdekatan dengan fasilitas ruang publik, diantaranya: kursi taman, tempat sampah, dan telepon umum
- 3) Fasilitas pemandu yang harus tersedia adalah block pemandu bulat untuk memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya dan block pemandu bergaris lurus untuk menunjukkan arah jalan
- 4) Material jalur pemandu harus menggunakan cat dengan warna terang, diantaranya jingga dan kuning.
- 5) Ukuran ubin pemandu adalah 30cm x 30cm



Gambar 2.7 Jenis-jenis Jalur Pemandu
 Sumber: PERMEN PU No : 03/PRT/M/2014

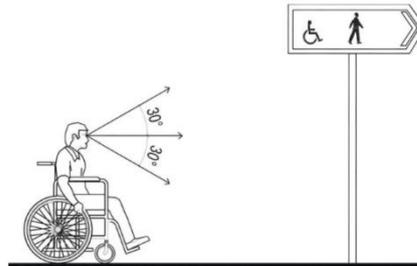
- c. Area parkir; Salah satu syarat keselamatan untuk penyandang difabel adalah terdapatnya area parkir yang memenuhi standar, diantaranya: (PERMEN PU NO. 30 /PRT/2006)
 - 1) Lokasi utama dari area parkir adalah berada pada dekat *entrance* fasilitas yang dilayani
 - 2) *Layout* parkir mengikuti ketentuan sebagai berikut
 - a) Kedapatan area parkir difabel pada setiap lima puluh slot parkir kendaraan roda empat, atau mengikuti jumlah *entrance* utama yang ada pada area,
 - b) Jarak paling jauh antara area parkir dengan fasilitas vital dalam area publik adalah lima puluh meter (50m).
 - 3) Kelengkapan fasilitas parkir harus terdapat empat hal, diantaranya
 - a) Marka garis utuh untuk batas ruang parkir
 - b) Marka simbol kursi roda
 - c) Marka ruang gerak bagi kursi roda
 - d) Rambu ruang parkir khusus bagi penderita cacat.
 - 4) Ukuran area parkir (SRP) difabel adalah 3,7m x 5m



Gambar 2.8 Standar Parkir Untuk Difabilitas
Sumber: PERMEN PU NO. 30 /PRT/2006

- d. Ramp; Keberadaan ramp sangat vital terutama pada area yang memiliki perbedaan ketinggian, dikarenakan ramp menjadi salah satu sarana bagi penyandang keterbatasan fisik yang ada di jalur pejalan kaki. Terdapat kriteria tertentu agar dapat mengakomodasi difabel, diantaranya: (PERMEN PU NO: 03/PRT/M/2014)
- 1) Lokasi ramp diletakan di setiap persimpangan, prasarana ruang pejalan kaki yang memasuki pintu keluar masuk bangunan atau titik-titik penyeberangan.
 - 2) Material ramp tidak licin, dapat menggunakan agregat kasar dengan sedikit bantalan pada ramp.
 - 3) Syarat keselamatan fasilitas ramp terdiri dari :
 - a) Permukaan datar dan tanjakan, tanpa adanya area yang terlalu curam
 - b) Pembatas rendah pinggir ramp (*low curb*) dirancang untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok keluar dari jalur
 - c) *Handrail* untuk pegangan
 - d) Lampu yang cukup yang akan membantu pengguna ramp saat malam hari.
 - 4) Ukuran ramp memiliki beberapa kriteria diantaranya :
 - a) Maksimum panjang mendatar dari satu ramp (dengan kemiringan 1:12) tidak boleh melebihi dari 900 cm.
 - b) Lebar minimum dari suatu ramp adalah 95 cm.
- e. Rambu dan Marka; Keberadaan rambu vital dikarenakan hal ini adalah fasilitas yang juga digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang difabel. Rambu ini memiliki beberapa kriteria diantaranya: (PERMEN PU NO. 30 /PRT/2006)

- 1) Lokasi marka, perambuan, dan papan informasi harus terletak di luar jalur pejalan kaki, pada titik interaksi sosial, dan sebaiknya berdekatan pada jalur pejalan kaki dengan arus padat, namun tidak boleh mengganggu aktivitas berjalan.
- 2) Ukuran marka, perambuan, dan papan informasi disediakan sesuai dengan kebutuhan dengan tinggi tidak membatasi pandangan mata (200cm)
- 3) Material yang digunakan yang memiliki durabilitas tinggi dan tidak menimbulkan efek silau.



Gambar 2.9 Standar Perambuan Untuk Difabel
Sumber: PERMEN PU NO. 30 /PRT/2006

Pada area-area tertentu, juga terdapat beberapa persyaratan ruang yang mengakomodasi difabilitas, dibagi berdasarkan area-area di alun-alun Kota Malang, diantaranya adalah

- a. Plasa; area plasa memiliki standar minimal untuk mengakomodasi difabilitas, yaitu dengan keberadaan tekstur ubin peringatan dan pengarah. (Permen PU NO. 12/PRT/M 2009)
- b. Area Bermain; Menurut Ikaputra, (2002), sebagian besar dari jenis difabilitas menggunakan alat bantu diantaranya adalah kursi roda, sehingga fasilitas-fasilitas dalam area bermain harus memiliki fasilitas yang dapat menyanggah kursi roda dengan ukuran standar kursi roda adalah 75cm x 100cm, sedangkan menurut Baskara (2011), salah satu fasilitas keselamatan pengaman adalah sabuk keselamatan maupun tonggak pengikat bagi difabel dan kursi roda.
- c. Toilet; Menurut Permen PU NOMOR : 30/PRT/M/2006, terdapat standar tertentu pada area toilet untuk mengakomodasi difabilitas, diantaranya adalah
 - 1) Toilet khusus difabel dengan ukuran minimal P=1,5m dan L+1,9m dan ukuran pintu masuk toilet difabel min 85cm
 - 2) Terdapat *handrail* pada fasilitas difabel dengan ketinggian minimal 48cm.

2.2 Tinjauan Alun-Alun

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/ 383/ 35.73.112/ 2016 Tentang Penetapan Taman Kota, Hutan Kota dan Jalur Hijau, menetapkan bahwa alun-alun yang berada di area jalan Merdeka kota Malang bernama taman Alun-alun kota Malang, dengan luas 23.970m², sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030, Alun-alun kota Malang difungsikan sebagai ruang terbuka publik yang berada di pusat kota Malang.

Menurut Kunto (1986), alun-alun pada dasarnya adalah halaman rumah yang memiliki ukuran yang besar. Pemiliknya adalah penguasa-penguasa wilayah yang bisa berarti raja, bupati, wedana dan camat, bahkan kepala desa yang kemudian difungsikan untuk kepentingan aktivitas pemerintah seperti ikwal pemerintahan militer maupun aktivitas rakyat seperti aktivitas perdagangan, kerajinan dan pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan alun-alun berfungsi pula sebagai ruang publik terbuka.

2.3 Evaluasi Purna Huni

2.3.1 Pengertian

Evaluasi purna huni merupakan suatu kegiatan peninjauan (pengkajian) kembali terhadap bangunan dan atau lingkungan binaan yang telah di huni (Soedibyo, 1989). Pengertian lebih lengkap di ungkapkan oleh Budiarmo (2007) yaitu metoda standar akademis yang digunakan oleh kalangan ilmiah dan konsultan di bidang kawasan binaan dan arsitektur, dengan tujuan penggunaan yaitu untuk mengetahui sejauh mana hasil sebuah karya arsitektur dan lingkungan mempunyai dampak secara *tangible* dan *intangibile* pada penghuninya. Dikarenakan tujuannya yang mencari tahu mengenai dampak arsitektur terhadap penggunanya maka dapat dikatakan fokus dari evaluasi purna huni adalah pada pengguna dan kebutuhannya serta usaha dalam memberikan wawasan mengenai konsekuensi desain yang sudah ada. Menurut Blyth, A & Gilby, A. (2006), evaluasi purna huni dibagi menjadi tiga tingkatan dalam melakukan evaluasi purna huni, ketiga tahapan tersebut adalah *operational review*, *project review* dan *strategic review*.

a. *Operational review*

Operational review menurut Blyth, A & Gilby, A (2006:12) adalah istilah untuk pengujian bangunan atau lingkungan binaan yang telah dihuni selama tiga bulan hingga satu tahun. Secara umum pengujian ini untuk melihat permasalahan-permasalahan utama pada fungsional bangunan atau lingkungan binaan yang dapat diselesaikan dengan fokus

utama adalah memberikan kesempatan untuk membuat penyesuaian kecil untuk masalah yang dapat ditangani secara sederhana. Dapat juga disimpulkan, *operational review* memungkinkan respon yang cepat untuk masalah yang muncul. Pendekatan yang dilakukan pada *operational review* ini menggunakan pendekatan indikatif, yang memberikan gambaran singkat dari proyek, tujuannya adalah untuk menyoroti kekuatan dan kelemahan utama dalam sebuah proyek.

b. Project review

Project review merupakan pengujian yang dapat dilakukan antara dua belas bulan hingga delapan belas bulan setelah suatu bangunan atau lingkungan binaan telah dihuni. Hal ini adalah tahapan yang pada umumnya sistem dan fasilitas suatu bangunan atau lingkungan binaan telah digunakan sepenuhnya. Secara umum penelitian ini dapat melihat bagaimana suatu lingkungan binaan digunakan dalam berbagai kondisi. Fokus utama dari *project review* ini dibagi menjadi empat, yang mana fokus tersebut dapat dipisah-pisah sesuai dengan kebutuhan akan penelitian, keempat fokus tersebut yang pertama adalah untuk melihat performa dari area spesifik atau fungsi yang spesifik yang berhubungan dengan kebutuhan pengguna, kedua adalah ulasan secara mendalam dari aspek fungsional dan atau aspek teknis, ketiga adalah mengidentifikasi dimana penyesuaian dan koreksi dibutuhkan pada yang terbangun dan sistemnya, keempat adalah berapa biaya yang dibutuhkan dalam perawatan bangunan atau lingkungan binaan yang terbangun. Menurut Blyth, A & Gilby, A (2006:13) informasi pada *project review* dapat digunakan pada akademis universitas, dan pada tim proyek dapat digunakan untuk membuat penyesuaian pada bangunan atau lingkungan binaan dan untuk menginformasikan temuan yang ada untuk digunakan pada proyek selanjutnya. *Project review* dilakukan melalui pendekatan diagnosis. Pendekatan diagnosis adalah analisis yang menyeluruh yang menghubungkan data kinerja fisik sebuah objek, data kemampuan pengguna dalam memanfaatkan objek hingga ke tanggapan atau interpretasi penghuni.

c. Strategic review

Strategic review adalah pengujian yang dapat dilakukan antara tiga hingga lima tahun dari masa penghunian. Pengujian ini dilakukan untuk melihat kebutuhan bangunan atau lingkungan binaan yang kemungkinan sudah berubah dan sudah tidak memenuhi perubahan yang ada. Selama tahap *strategic review*, ada kesempatan untuk mengevaluasi kebutuhan bangunan atau lingkungan binaan itu sendiri melalui penghunian. Fokus utama

dari *strategic review* adalah bagaimana bangunan mungkin menanggapi perubahan di masa depan, dan bagaimana bangunan itu telah merespon perubahan yang ada. Menurut Blyth, A & Gilby, A (2006:13) informasi dari *strategic review* dapat digunakan untuk kepentingan publik maupun akademis dan secara khusus dapat digunakan pada tim proyek untuk melakukan pembekalan apabila ada proyek selanjutnya yang serupa. Pendekatan yang dilakukan pada *strategic review* menggunakan pendekatan investigatif. Pendekatan investigatif adalah penyelidikan lebih menyeluruh dan kompleks dengan menggunakan teknik penelitian yang lebih ketat untuk menghasilkan data yang lebih kuat.

Menurut Haryadi dan Setiawan (1995) evaluasi purna huni perlu dilakukan dikarenakan dalam perancangan sering terdapat persepsi bahwa sebuah desain atau rancangan sudah di anggap selesai apabila telah terbangun, berwujud fisik dan dihuni. Dikarenakan persepsi tersebut maka evaluasi ini digunakan untuk mencari fakta-fakta hasil kerja rancang bangun, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai masukan bagi terciptanya perancangan berikutnya dengan kualitas yang lebih baik.

2.3.2 Komponen Pengendalian dalam Evaluasi Purna Huni

Dalam Evaluasi Purna Huni terdapat kriteria yang dapat digunakan sebagai komponen pengendalian yang berguna untuk mengetahui bagian mana saja yang harus diteliti dalam Evaluasi Purna Huni (Blyth, A & Gilby, A, 2006:22). Kriteria-kriteria tersebut didasarkan dari kelayakan sebuah desain yang dapat digunakan untuk pengujian ruang terbuka publik yang diantaranya adalah:

- a. *Site zoning* (Lokasi), berhubungan dengan tata letak objek terhadap lingkungan sekitarnya.
- b. *Dimension* (Ukuran), berhubungan dengan ukuran-ukuran yang ada pada bangunan atau objek secara keseluruhan dan atau sub-objek yang diamati.
- c. *Physical characteristic* (Karakteristik fisik/ elemen fasilitas), berhubungan dengan bentuk dalam ruang yang termasuk elemen-elemen fisik di dalam ruang tersebut.
- d. *Relationship with other spaces* (Layout), berhubungan dengan penataan ruang antar ruang dan penataan di dalam ruang itu sendiri.
- e. *Furnishing material* (Material penutup), berhubungan dengan material apa saja yang digunakan sebagai *finishing* dari objek yang berkaitan.

2.3.3 Aspek Dalam Evaluasi Purna Huni

Alun-alun kota Malang dikaji pada lebih dari 1 tahun setelah dihuni, sehingga termasuk dalam tahap *Project Review*. Secara keseluruhan Soedibyo (1989) menyebutkan bahwa terdapat tiga aspek dalam evaluasi purna huni, yang terdiri dari aspek fungsional, aspek teknis, dan aspek perilaku manusia. Dalam pelaksanaannya, sebuah evaluasi purna huni dapat menerapkan berbagai metode, strategi, serta prosedur penelitiannya berdasarkan lingkup dan spesifikasi penelitian, sehingga dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa aspek-aspek yang ada di evaluasi purna huni dapat disendirikan ataupun digabungkan untuk memperkuat data penelitian (Soedibyo, 1989). Pada penelitian ini hanya menganalisa terhadap aspek fungsional dan aspek teknis yang disesuaikan dengan jenis objek yaitu alun-alun.

a. Aspek fungsional

Secara umum, aspek fungsional menyangkut segala aspek bangunan yang secara langsung mendukung kegiatan pemakai dengan segala atributnya. Perancangan bangunan yang menekankan fungsi, antara lain akan berpedoman pada kesesuaian antara area kegiatan dengan segala kegiatan yang berlangsung di dalamnya. Menurut Soedibyo (1989) terdapat beberapa hal kritis yang mengacu pada aspek fungsionalis, yaitu pengelompokan fungsi, sirkulasi, faktor manusia dan fleksibilitas perubahan. Pada evaluasi purna huni Alun-alun kota Malang melakukan penyesuaian yaitu berupa mengacu pada Soedibyo (1989) berupa pengelompokan fungsi, sirkulasi, dan faktor manusia. Fleksibilitas dan perubahan juga tidak digunakan karena merupakan aspek yang dikaji pada bangunan atau lingkungan binaan yang telah mengalami perubahan fungsi, baik sebagian maupun seluruhnya (Soedibyo, 1989), sehingga fleksibilitas dan perubahan lebih cocok digunakan pada *strategic review*.

1) Pengelompokan fungsi

Menurut Soedibyo (1989) pengelompokan fungsi menyangkut konsep pemisahan fungsi-fungsi yang berlangsung di dalam satu lingkungan binaan. Di dalam pengelompokan fungsi hal yang dapat dijabarkan adalah fungsi apa yang ada pada eksisting lapangan, bagaimana fungsi tersebut memenuhi tugasnya dalam memwadahi aktivitas-aktivitas yang telah disepakati. Hal ini berhubungan dengan setting fisik di dalamnya, jenis aktivitas yang berlangsung, pola aktivitas, serta bagaimana pengguna memanfaatkan ruangnya. Pengelompokan fungsi dapat menunjukkan bagaimana perilaku pengguna terhadap wadah lingkungan binaan terhadap penggunaannya dan dapat pula menjadi suatu penerangan apakah terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi.

2) Sirkulasi

Penelitian mengenai sirkulasi dapat memperlihatkan apakah ada kesalahan dalam elemen sirkulasi yang menyebabkan ada daerah yang “terlalu sepi” dan ada daerah yang “terlalu padat”, bahkan beberapa daerah yang tak tergunakan sama sekali. Dalam substansi sirkulasi membutuhkan pola sirkulasi yang terjadi dan dapat menunjukkan jalur masuk dan jalur keluar menuju ruang, pola perpindahan ruang yang dapat memperlihatkan apakah ada jalur pejalan kaki yang tidak tergunakan dengan baik, serta orientasi pola pergerakan manusia yang terjadi.

3) Faktor manusia (Ukuran ruang dan kelengkapan fasilitas)

Faktor manusia adalah sebuah istilah yang merujuk pada standar ataupun kesesuaian dengan kondisi yang terjadi, yang mana hal yang diperhatikan adalah kelengkapan fasilitas ruang dan ukuran-ukuran ruang ataupun elemen ruang terhadap pengguna yang berhubungan dengan standar.

b. Aspek teknis

Aspek teknis adalah aspek yang berhubungan dengan keteknisan bangunan atau lingkungan binaan yang berhubungan dengan kondisi fisiknya (Soedibyo, 1989). Penjelasan secara lebih umum dijelaskan oleh Preiser (1988) dalam Setiawan, B dan Haryadi (2010:27) yang mana aspek teknis ini meliputi keamanan, kesehatan, dan keselamatan ruang yang sesuai dengan standar ataupun peraturan yang berlaku.

1) Keamanan dalam ruang

Keamanan mencakup segala hal yang berhubungan dengan keselamatan dari pengguna ruang dari bahaya kejahatan/ kriminalitas. Hal ini juga berhubungan pada kesiapan ruang apabila terjadi sebuah tindakan kriminal yang menyebabkan kerugian terhadap pengguna. Pada ruang terbuka publik, aspek keamanan ruang seringkali berhubungan dengan keterjangkauan dan kemudahan akses dalam menuju ruang oleh para petugas keamanan dengan area yang dilayani, selain itu berhubungan dengan bagaimana fasilitas-fasilitas dan sistem perancangan yang ada di ruang publik tersebut dapat mempermudah pengawasan dari berbagai ancaman kejahatan atau kriminalitas.

2) Kesehatan dalam ruang

Kesehatan ruang pada ruang terbuka publik berhubungan dengan bagaimana sebuah ruang dapat membuat pengguna didalamnya tidak mengalami sakit fisik dan

terganggu inderanya baik itu visual, penciuman, maupun pendengaran. Pada ruang terbuka publik dapat berupa material untuk fasilitas yang tidak mengandung racun serta teknis peletakan elemen sanitasi dan fasilitas-fasilitas tertentu di dalam ruang yang dapat mempengaruhi kesehatan, serta bagaimana kesehatan ruang itu sendiri dari pengaruh polusi jalan raya maupun kesehatan yang berhubungan dengan kecukupan penerangan pada malam hari.

3) Keselamatan dalam ruang

Keselamatan ruang berhubungan suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, emosional, dan psikologis, dari ancaman berupa faktor-faktor yang membahayakan. Pada ruang terbuka publik hal ini dapat mencakup keselamatan pada fasilitas-fasilitas yang ada yang mana keberadaannya tidak boleh mencelakakan pengguna, yang terdiri dari keselamatan pada area yang beratap, maupun area yang terbuka, peletakan dan penataan fasilitas yang dapat membahayakan serta termasuk diantaranya penggunaan material yang dapat menjamin keselamatan di dalam ruang.

2.3.4 Tahapan dalam Evaluasi Purna Huni

Mc Grath (dalam Soedibyo, 1989) menyatakan bahwa ada tingkat keputusan yang harus dilalui dalam melakukan penelitian yaitu strategi penelitian. Strategi penelitian menyangkut pendekatan dasar untuk penelitian seperti eksperimen laboratorium, eksperimen lapangan, studi lapangan dan lain-lain. Dalam proses penelitian menggunakan Evaluasi Purna Huni sebagaimana disebutkan Zimring (dalam Soedibyo, 1989) memiliki lima tahapan yang umumnya dilakukan, meliputi : *Entry and Initial Data Collection*, *Designing the Research*, *Collecting Data*, *Analyzing Data* dan *Presenting Information*.

a. Entry and Initial Data Collection (Mengidentifikasi Latar Belakang)

Pada Tahap ini yang dikerjakan terutama adalah mencari dukungan dari semua individu yang terlibat (seperti: pemakai dan klien) serta mempelajari secara garis besar riwayat proyek untuk menemukan hal yang penting (bagi pengambil keputusan). Hasil yang diperoleh pada tahap pertama ini antara lain berupa deskripsi tentang tujuan isu dan konteks permasalahan.

b. Designing The Research (Mendesain Penelitian)

Tujuan penelitian adalah hal utama yang harus dirumuskan sebelum peneliti menentukan metode penelitian. Hamidi (2007:12) menyebutkan, tujuan penelitian terdiri

dari eksplorasi deskripsi, dan eksplanasi. Eksplorasi bertujuan untuk semata-mata ingin memuaskan rasa ingin tahu agar memperoleh pemahaman lebih jelas tentang peristiwa sosial yang terjadi, deskripsi bertujuan untuk menyajikan secara teliti (*accurately and precisely*) tentang karakteristik yang sangat luas dari populasi, sedangkan eksplanasi dikenal sebagai penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksplanasi dari hubungan antara dua orang atau lebih konsep variabel dari suatu fenomena sosial.

Segera setelah tujuan penelitian tercipta, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perumusan masalah yang bersifat spesifik. Permasalahan dapat dilakkan dengan dua cara yaitu formal dan informal (Buckley dalam Soedibyo, 1989).

c. *Collecting Data* (Mencari Data-data yang Berkaitan)

Pada tahap ini pengambilan data dilakukan dengan memerhatikan problem etis yang mungkin muncul. Blyth, A & Gilby, A (2006) menyertakan serangkaian butir mengenai prinsip-prinsip dalam pengambilan data pada evaluasi purna huni, yang mana dapat digunakan sesuai kebutuhan dari peneliti, antara lain:

- 1) *Walk through and Observation*, yaitu suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya dan atau pada suatu aktifitas yang sedang berlangsung.
- 2) *Workshop session*, yaitu suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya.
- 3) *Interviewing*, yaitu adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.
- 4) *Questionaries*, yaitu daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap dan biasanya sudah menyediakan pilihan jawaban (kuesioner tertutup) atau memberikan kesempatan responden menjawab secara bebas (kuesioner terbuka).
- 5) *Focus Group*, yaitu adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok
- 6) *Measurements and physical monitoring*, yaitu suatu kegiatan menentukan kuantitas suatu objek melalui aturan-aturan tertentu sehingga kuantitas yang diperoleh benar-benar mewakili sifat dari suatu objek yang dimaksud.

Dalam evaluasi *project review* evaluasi purna huni pada aspek fungsional dan teknis lebih tepat dilakukan dengan menggunakan metoda observasi, pengukuran langsung dan

kemudian dapat ditunjang dengan patokan pada literatur atau peraturan tertentu (Blyth, A & Gilby, A, 2006:16).

d. Analyzing Data (Menganalisa Data)

Metode analisa data dalam evaluasi purna huni dapat dilakukan dengan banyak cara, yang kemudian dicari metode atau prosedur mana yang paling cocok untuk penelitian yang dilakukan, salah satu cara paling umum adalah menggunakan metode evaluatif dalam analisa data (Soedibyo, 1989). Yunanda (2009) memberikan penjelasan bahwa evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

e. Presenting Information (Menyajikan Informasi Hasil Penelitian)

Dalam penyajian informasi, harus bisa memenuhi pertanyaan berikut (Soedibyo, 1989) :

- 1) Informasi yang ada haruslah dipublikasikan, dapat digabungkan dari hasil-hasil aspek fungsional dan teknis menjadi kesatuan, ataupun dipisah sesuai dengan kadarnya
- 2) Informasi yang ada harus dipresentasikan secara sederhana, dapat menggunakan gambar, rekomendasi desain, diagram, maupun kesimpulan.

2.3.5 Teknik Penyelesaian *Project Review* Evaluasi Purna Huni

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada cara pengambilan data, Blyth, A & Gilby, A (2006:16) memberikan penjelasan bahwa evaluasi purna huni pada *project review* yang mencangkup aspek fungsional akan lebih baik dilakukan dengan metode observasi, pengukuran langsung dan menggunakan literatur ataupun standar sebagai patokan. Hal ini senada dengan Soedibyo (1989) yang menyatakan Evaluasi Purna Huni dalam tahap *project review* yang membutuhkan penyelesaian dalam aspek fungsional khususnya yang berhubungan dengan aktivitas dapat dilakukan dengan observasi dan pemetaan. Barker dan Wright (1989) dalam Laurens (2005) mengungkapkan ada syarat yang harus dipenuhi agar suatu aktivitas dapat diobservasi menggunakan pemetaan aktivitas, yaitu:

- a. Terdapat suatu aktivitas yang berulang.
- b. Terdapat *millieu* atau tata ruang tertentu.
- c. Terdapat hubungan antara keduanya.
- d. Dilakukan pada waktu dan periode tertentu.

Dalam pengamatan observasi yang berhubungan dengan aktivitas dapat dilakukan dengan melalui beberapa analisis, meliputi (Adhitama, 2013):

a. Time budget

Teknik ini memungkinkan suatu observasi untuk mengurai atau mendekomposisikan suatu kegiatan sehari-hari, aktivitas mingguan atau musiman kedalam seperangkat *setting* yang meliputi hari kerja mereka atau gaya hidup mereka (Michelson dan Reed dalam Laurens, 2005). Fungsi dari *time budget* adalah untuk memperlihatkan bagaimana seseorang menggunakan waktunya.

b. Person centered mapping

Teknik ini menekankan pada pergerakan manusia pada periode waktu tertentu dimana teknik ini berkaitan dengan tidak hanya satu tempat atau lokasi akan tetapi beberapa tempat atau lokasi (Sommer, 1980). Teknik ini dilakukan dengan membuat alur sirkulasi sampel setiap manusia di area yang diamati atau di peta untuk mengetahui dari mana dan kemana orang pergi dengan mengidentifikasi arah lintasan pergerakannya. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Menentukan jenis pelaku person yang akan diamati (aktor atau penggunaan ruang secara individu).
- 2) Menentukan waktu pengamatan (pagi, siang dan malam).
- 3) Mengamati aktivitas yang dilakukan pada masing-masing sampel person.
- 4) Mencatat aktivitas sampel person yang diamati dalam matriks atau tabel.

c. Place centered mapping

Teknik *place centered mapping* berpusat pada tempat adalah teknik yang mengutamakan pada penggambaran pemakainya serta penentuan-penentuan perilaku yang menitik beratkan pada area aktivitas. *Place centered mapping* digambarkan dalam bentuk sketsa atau diagram mengenai suatu area dimana manusia melakukan berbagai kegiatannya dengan tujuan untuk menggambarkan perilaku dalam peta, mengidentifikasi jenis, pola dan frekuensi aktivitas, serta menunjukkan kaitan antara perilaku tersebut dengan suatu bentuk rancangan yang spesifik (Sommer, 1980). *Place-centered mapping* digunakan untuk mengetahui bagaimana masyarakat memanfaatkan menggunakan, atau mengakomodasikan perilakunya dalam suatu situasi waktu dan tempat tertentu. Sehingga penelitian ini memiliki perhatian pada suatu tempat yang spesifik (Haryadi & Setiawan, 1995). Penelitian ini memiliki langkah-langkah yaitu :

- 1) Menggunakan peta dasar yang telah dibuat untuk memberikan gambaran lokasi area ruang publik.
- 2) Membuat dan memetakan daftar perilaku yang akan diamati.
- 3) Dalam kurun waktu penelitian, peneliti mencatat berbagai perilaku yang terjadi pada masing-masing tempat.
- 4) Data hasil dari pencatatan tersebut kemudian dijelaskan melalui deskripsi data dan disertai dengan foto.
- 5) Data aktivitas atau perilaku yang telah terdeskripsikan di masing-masing lokasi area observasi diklasifikasikan ke dalam temuan pola perilaku yang paling umum atau sering terjadi.

Sedangkan dalam faktor manusia yang mana membutuhkan pengetahuan mengenai standar-standar dan kondisi eksisting dari proyek, Soedibyo (1989) menyatakan hal tersebut dapat digunakan analisa dengan metode investigatif, yaitu membandingkan kondisi eksisting yang ada dari kelengkapan fasilitas, ukuran dengan standar ataupun literatur dari buku maupun dari peraturan pemerintah yang terkait. Senada dengan hal itu, Blyth, A & Gilby, A (2006:16) memberikan acuan mengenai evaluasi purna huni dalam tahap *Project Review* yang membutuhkan penyelesaian dalam aspek teknis yang juga membutuhkan pengetahuan akan standar-standar yang berhubungan dengan teknis, yang dapat dilakukan dengan metode investigatif, yaitu melakukan melakukan pengamatan langsung (observasi), pengukuran serta penilaian berdasarkan literatur, sehingga dapat melihat kesesuaian desain dengan aspek teknis ruang terbuka publik yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam ruang dengan standar dan literatur perancangan yang ada, sehingga dapat terlihat apakah teknis tersebut sudah memenuhi kebutuhan pengguna ruang.

Berdasarkan evaluasi purna huni yang telah dijelaskan, maka terdapat kriteria-kriteria tertentu yang harus memenuhi aspek fungsional serta aspek teknis sebuah ruang terbuka publik. Pada aspek fungsional maka hal kritis dari elemen penelitian aspek fungsional harus memenuhi pemisahan fungsi, sirkulasi, serta faktor manusia, sedangkan pada aspek teknis harus memenuhi kesehatan ruang, keselamatan ruang, dan keamanan ruang (Soedibyo, 1989).

Pada aspek fungsional yang berhubungan dengan pengelompokan fungsi, maka akan terlihat fungsi ruang apa saja pada kondisi eksisting, serta kesesuaian fungsi tersebut dalam

mewadahi aktivitas pengguna, sehingga harus teridentifikasi elemen pembentuk ruangnya, pelaku aktivitas, jenis aktivitas pengguna, pola aktivitas, serta pola pemanfaatan ruang.

2.4 Tinjauan Riset Terdahulu

2.4.1 Konsep Metafora Ruang Pada Ruang Terbuka Perkotaan "Studi Kasus : Alun-Alun Kota Malang"

Penelitian mengenai Konsep Metafora Ruang Pada Ruang Terbuka Perkotaan ini dilakukan pada tahun 2007. Penelitian ini mengambil studi kasus pada alun-alun kota Malang yang mana memiliki keunikan dengan adanya dua buah alun-alun yang tidak dijumpai pada kota-kota lainnya, yaitu Alun-alun kota Malang yang berkembang atas dasar kepentingan rakyat dan alun-alun Tugu yang berkembang atas kepentingan politik dan pelengkap balaikota). Penelitian ini berusaha melihat sebuah konsep metafora pada ruang terbuka (*undefined space*) yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Beragam data sekunder dijadikan referensi dalam Analisa Wacana untuk mendapatkan data-data historis yang akurat mengenai tentang proses pembentukan dan perkembangan alun-alun Kota Malang . Dengan memahami ruang terbuka publik dalam konsep square di Eropa dan ruang terbuka publik dalam konsep alun-alun Jawa, akan dibandingkan antara keinginan dan harapan pemerintah sebagai perancang dan penguasa, dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna dan pengamat, atas keberlanjutan identitas alun-alun Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan metoda *Pyramidal Indepth Interview* dengan dibantu pendekatan Observing Environmental Behavior untuk menggali persepsi interpreter mengenai makna alun-alun Kota Malang pada masa koloniaslisasi, awal kemerdekaan RI hingga Reformasi. Selanjutnya dipilih metoda pemetaan proliferasi ruang alun-alun oleh pengguna untuk mengetahui peluberan teritori ruang alun-alun akibat aktivitas yang terjadi (*vehicle*) dari makna pemerintah atas ruang alun-alun kota Malang yang sebenarnya (*tenor*).

Output penelitian berupa temuan teori dan temuan metoda dalam membaca objek ruang terbuka kota. Dari aspek teoritik, ditemukan adanya dinamikametafora dalam konsep ruang terbuka kota.

2.4.2 Faktor Penentu Setting Fisik Dalam Beraktifitas Di Ruang Terbuka Publik “Studi Kasus Alun – Alun Merdeka Kota Malang”

Penelitian mengenai Faktor Penentu Setting Fisik Dalam Beraktifitas Di Ruang Terbuka Publik dilakukan pada tahun 2013. Penelitian ini mengambil studi kasus di alun – alun Merdeka kota Malang, yang mana kondisi alun – alun Merdeka Malang yang ada penataannya lebih di fungsikan sebagai ruang terbuka hijau di tengah kota dari pada pemanfaatan sebagai ruang yang menampung aktifitas publik. Untuk itu perlu penataan setting fisik alun – alun yang dapat berfungsi, baik sebagai ruang terbuka hijau serta dapat mewadahi berbagai perilaku dan aktivitas publik di pusat kota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penentu setting fisik dalam beraktifitas di ruang terbuka publik. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori mengenai ruang terbuka publik, behavior setting, lingkungan dan perilaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pengguna alun–alun Merdeka Malang, metode pengumpulan datanya menggunakan place-centered mapping dan person-centered mapping. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penataan setting fisik dalam ruang publik, dapat mempengaruhi perilaku pengguna dalam beraktifitas di dalam alun – alun.

2.4.3 Evaluasi Purna Huni Fasilitas Pada Taman Wisata Budaya Senaputra Malang

Penelitian mengenai Evaluasi Purna Huni Fasilitas Pada Taman Wisata Budaya Senaputra Malang dilakukan pada tahun 2014. Taman wisata budaya Senaputra merupakan taman wisata di Kota Malang yang d dalamnya terdapat fasilitas budaya. Fasilitas pada Senaputra saat ini kurang diminati masyarakat dikarenakan kurang memadahi dan kurang dapat mengikuti perkembangan jaman. Sejak berdirinya hingga sekarang taman wisata ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Padahal seiring berkembangnya jaman, berkembang pula teknologi yang mempengaruhi kebutuhan dan selera masyarakat.

Evaluasi Purna Huni (EPH) digunakan untuk mengevaluasi fasilitas pada taman wisata budaya Senaputra yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan performa bangunan secara fisik pada masing-masing fasilitas dalam taman budaya. Metode yang dilakukan adalah Metode Investigatif yaitu penilaian berdasarkan literatur dan perbandingan dengan bangunan atau fasilitas lainnya yg sama. Dalam hal ini evaluasi dilakukan berdasarkan observasi langsung pada lapangan lalu diperbandingkan standar fasilitas pada bangunan taman wisata budaya. Hasil dari evaluasi menunjukkan kondisi fasilitas Senaputra jika

dibandingkan dengan standar fasilitas pada wisata budaya. Sehingga dapat menjadi dasar dalam proses pengembangan taman wisata budaya Senaputra.

2.4.4 Kesimpulan Studi Terdahulu

Ke tiga penelitian yang telah ditinjau menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu antara lain:

- a. Pada penelitian mengenai alun-alun Malang yang berhubungan dengan ruang terbuka publik seringkali menggunakan pemetaan yang mencari setting fisik dan teritori pada alun-alun tersebut dengan melakukan observasi berdasarkan temuan langsung oleh peneliti.
- b. Pada penelitian ke tiga menunjukkan bahwa evaluasi purna huni dapat dipilih sesuai kebutuhan aspek mana yang akan diteliti dapat berupa aspek fungsional, aspek teknis, maupun aspek perilaku.
- c. Penelitian Evaluasi Purna Huni pada area ruang terbuka publik membutuhkan data mengenai *setting* fisik pada ruangan tersebut
- d. Metode yang digunakan beragam, namun sebagian besar menggunakan pendekatan observasi dan dapat dikombinasi dengan metode lain untuk melihat aktivitas pada ruang publik maupun fasilitas di dalamnya, salah satu teknik yang dapat dikombinasikan adalah teknik *time budget* (pemilihan waktu-waktu tertentu) juga menjadi alternatif pada pengamatan aspek fungsional.
- e. Hasil akhir penelitian berbeda-beda tergantung aspek mana yang dikaji. Namun sebagian besar adalah untuk mengetahui baik buruknya suatu area studi terhadap pemakainya.

Tabel 2.2 Tinjauan Studi Terdahulu

No	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kontribusi terhadap kajian
1	Konsep Metafora Ruang Pada Ruang Terbuka Perkotaan "Studi Kasus : Alun-Alun Kota Malang"	Penelitian ini berusaha melihat sebuah konsep metafora pada ruang terbuka (undefined space) yang belum pernah dilakukan sebelumnya	Menggunakan metoda <i>Pyramidal Indepth Interview</i> dengan dibantu pendekatan <i>Observing Environmental Behavior</i> . Selanjutnya dipilih metoda pemetaan proliferasi ruang alun-alun oleh pengguna.	<i>Output</i> penelitian berupa temuan teori dan temuan metoda dalam membaca objek ruang terbuka kota. Dari aspek teoritik, ditemukan adanya dinamikametafora dalam konsep ruang terbuka kota.	Menggunakan metoda yang berfungsi untuk meneliti aktivitas yang terjadi dari makna pemerintah ruang alun-alun kota Malang yang sebenarnya, sehingga terpaut pada aspek fungsional pada EPH yang mnecari mngenai aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan ruang.
2	Faktor Penentu Setting Fisik Dalam Beraktifitas Di Ruang Terbuka Publik "Studi Kasus Alun – Alun Merdeka Kota Malang"	Mengidentifikasi faktor penentu setting fisik dalam beraktifitas di ruang terbuka publik.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pengguna alun-alun Merdeka Malang, metode pengumpulan datanya menggunakan <i>place-centered mapping</i> dan <i>person-centered mapping</i> .	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penataan setting fisik dalam ruang publik, dapat mempengaruhi perilaku pengguna dalam beraktifitas di dalam alun - alun.	Menggunakan teknik yang digunakan dalam meneliti ruang publik berdasarkan pemetaan secara behavior setting yang dapat dikombinasikan dengan metoda lain seperti time budget sehingga memiliki kesamaan dengan cara penelitian pada EPH untuk mencari aspek fungsional yang mana berhubungan dengan aktivitas dan aspek teknis yang berhubungan dengan setting fisik Alun-alun kota Malang.
3	Evaluasi Purna Huni Fasilitas Pada Taman Wisata Budaya	Untuk mengetahui kelayakan performa bangunan secara fisik pada masing-masing fasilitas dalam	Metode yang dilakukan adalah Metode Investigatif yaitu penilaian berdasarkan literatur dan perbandingan dengan	Evaluasi Purna Huni fasilitas pada taman wisata budaya Senaputra meliputi aspek fungsional yaitu pengelompokfungsi, jenis ruang dan dimensi ruang pada masing-masing fasilitas berkaitan dengan kenyamanan pengguna. Dari segi pengelompokan fungsi, terdapat beberapa bangunan yang letaknya tidak sesuai dengan pembagian zona yaitu ruang rias	Menggunakan aspek fungsional dan menggunakan metode investigatif. Sehingga berkontribusi terhadap penelitian EPH yang berhubungan dengan faktor manusia, bahwa penggunaan aspek faktior manusia

No	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kontribusi terhadap kajian
	Senaputra Malang	taman budaya.	bangunan atau fasilitas lainnya yg sama	<p>dan busana serta ruang sekretariat seni tari sehingga letaknya perlu dipindah dari zona penerimaan ke zona budaya. Fasilitas lainnya pada Senaputra peletakannya sudah sesuai dengan fungsinya. Dari hasil Evaluasi Purna Huni terhadap pengelompokan fungsi pada</p> <p>Pada Evaluasi Purna Huni jenis ruang fasilitas yang perlu ditambah fasilitas penunjang antara lain teater terbuka, studio kesenian, ruang rias dan busana, kolam renang dan ruang ganti, area parkir, kafetaria. Sehingga disimpulkan bahwa 75% dari keseluruhan fasilitas kurang layak dari segi kelengkapan fasilitas penunjang. Sedangkan dari evaluasi dimensi ruang terdapat fasilitas yang perlu diperluas antara lain teater terbuka, ruang rias dan busana, mushola, ruang ganti, loket dan kantor pengelola, area parkir. Sehingga disimpulkan bahwa 75% dari keseluruhan fasilitas tidak mencukupi standar luasan minimal fasilitas taman budaya.</p>	<p>untuk melihat standar dan konfigurasi terhadap pengguna dapat menggunakan metode investigatif. Hal ini juga akan sama dengan pada aspek teknis yang juga menggunakan metode evaluasi berdasarkan investigasi.</p>

2.5 Landasan Teori

Menurut Carr (1992) ruang publik yang baik dapat digunakan secara bersama-sama dan mudah diakses oleh siapa saja dan setiap saat. Namun peran Alun-alun kota Malang tidak hanya sebatas itu saja. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Alun-alun kota Malang difungsikan sebagai ruang terbuka publik yang berada di pusat kota Malang, memberikan penjelasan bahwa Alun-alun kota Malang juga mengemban fungsi yang menurut Hakim (1987) berupa fungsi umum, yaitu sebagai tempat aktivitas yang beragam dan fungsi ekologis, yaitu sebagai tempat pengendalian ekosistem dan melembutkan arsitektur di dalam kota dengan bukaan ruangnya maupun vegetasinya.

Alun-alun kota Malang mengalami perombakan penataan ruang pada tahun 2015 memiliki berbagai ragam aktivitas didalamnya. Seiring berjalannya waktu, aktivitas tersebut terkadang menjadi tidak terkendali dan tidak sesuai dengan wadah yang sebelumnya telah direncanakan seperti penempatan aktivitas pada lahan yang steril aktivitas, serta menjadi menumpuk pada suatu wilayah apabila terjadi kepadatan aktivitas pada hari libur, dan munculnya pedagang-pedagang asongan yang pada akhirnya juga memengaruhi bagaimana masyarakat dalam memanfaatkan ruang. Tata lingkungan fisik menjadi tidak maksimal terutama pada saat-saat terjadinya keramaian aktivitas pada hari libur.

Evaluasi Purna Huni terhadap sebuah desain sangat diperlukan untuk melihat apakah desain yang terbangun tersebut sudah sesuai dengan desain yang terencanakan (Soedibyo, 1989). Pada hal ini adalah Alun-alun kota Malang. EPH juga dapat digunakan untuk melihat pola aktivitas yang terjadi didalamnya. Penjabaran mengenai jenis evaluasi purna huni yang harus dikaji menggunakan teori Blyth, A & Gilby, A (2016), yaitu menggunakan penelitian evaluasi purna huni pada tahap *Project Review* dikarenakan tahap ini digunakan untuk mengkaji bangunan atau lingkungan binaan yang telah satu tahun terbangun, dengan objek yang dapat diteliti adalah aspek fungsional dan aspek teknis.

Aspek fungsional yang dikaji menggunakan kombinasi teori Soedibyo (1989) dan berupa pengelompokan fungsi, sirkulasi serta faktor manusia. Pada pengelompokan fungsi mencakup bagaimana keterkaitan antara fungsi yang ada dengan aktivitas yang ada, sehingga dibutuhkan analisa mengenai jenis zona yang akan diteliti yang juga berhubungan dengan elemen fisik atau atribut ruang, siapa pelaku di dalamnya, bagaimana ia beraktivitas di dalam zona tersebut, dan kapan waktunya terjadi aktivitas tersebut. Dalam sirkulasi mencakup bagaimana pola pergerakan antar ruang dari pengguna di dalam

alun-alun sehingga akan dibutuhkan pola sirkulasi yang terjadi, sedangkan faktor manusia berhubungan kelengkapan fasilitas dan ukuran atau dimensi dengan standar-standar dan kriteria dasar ruang berdasarkan literatur, peraturan maupun standar umum.

Kajian pengelompokan fungsi memerlukan analisa pola aktivitas dan pola pemanfaatan ruang, serta tata fisik ruang (Soedibyo, 1989). Pola aktivitas sendiri menurut carr (1992) dapat memperlihatkan jenis aktivitas ruang, pola aktivitas dalam ruang, dan pola pemanfaatan ruang. Pembagian jenis aktivitas berdasarkan keterlibatannya berdasar ruang yang ada menjadi aktivitas pasif dan aktif. Dengan digabungkan dari pengamatan sebelum penelitian maka didapatkan aktivitas pasif, yaitu: duduk, berdiri, tidur, berbaring santai. Aktivitas aktif meliputi: berjalan, makan dan minum, berfoto, berkumpul komunitas, bermain, olah raga atletik (terdiri dari *jogging*, lari, senam dan bersepeda), olah raga permainan (terdiri dari *skate*, bola tangan dan bola kaki), dan berjualan, yang mana aktivitas tersebut juga memiliki pola-pola tersendiri tergantung bagaimana masyarakat tersebut memanfaatkan ruangnya, yang kemudian membentuk pola aktivitas. Dalam memanfaatkan ruang, akan terlihat aktivitas apa saja yang dilakukan per individu serta bagaimana ia memanfaatkan ruang dengan aktivitasnya tersebut, dan elemen fisik ruang/ atribut ruang apa saja yang digunakan, sehingga membentuk pola pemanfaatan ruang. Ketiga aspek tersebut dapat memperlihatkan suatu tatanan dari ruang publik (carr, 1992). Kefungsian ruang sendiri digunakan untuk mengidentifikasi desain Alun-alun kota Malang berupa zona-zona yang difungsikan untuk berbagai fungsi ruang yang berbeda, sedangkan konteks dan bentuk ruang (konfigurasi ruang) adalah untuk memperjelas batas-batas dari ruang yang diteliti..

Teknik penyelesaian pengelompokan fungsi menggunakan *Time Budget* (Joyce, 2005) dan *Place-centered Mapping* (Sommer, 1980). Teknik *Time Budget* digunakan untuk memperlihatkan bagaimana seseorang mengonsumsi atau menggunakan waktunya, dengan membagi penelitian menjadi menjadi waktu secara harian, yaitu pagi (08.00-11.00), siang (11.01-15.00), sore (15.01-18.00), malam (18.01-22.00), sedangkan hari yang ditetapkan adalah hari kerja (Senin-Kamis), hari ibadah (Jum'at), hari libur (Sabtu-Minggu) serta hari libur dengan *event* tertentu di Alun-alun kota Malang. Selanjutnya menggunakan teknik *Place-centered Mapping* (Sommer, 1980) untuk memetakan aktivitas dan *setting* ruang.

Kajian sirkulasi untuk memperlihatkan bagaimana area sirkulasi di ruang tergunakan harus membutuhkan pencapaian, pola sirkulasi dan perpindahan ruang (Soedibyo, 1989). Untuk terpenuhi itu semua, maka harus jelas terlihat bagaimana bentuk *entrance*-nya serta dimana letaknya, dan juga bagaimana jalur sirkulasi untuk menuju area-area spesifik dari

ruang tersebut (PPS, 1975). Pencapaian yang dikaji menggunakan analisa pencapaian ching (2007) yang dibagi menjadi pencapaian frontal, pencapaian tidak langsung, pencapaian spiral, sedangkan pola sirkulasi dari aktivitas berjalan pengguna menggunakan teori Simond (1961) yang terdiri dari pola *direct*, *curvilinear* dan *erratic*, serta analisa pola perpindahan manusia menggunakan teori Ching (2007). Terdiri dari melewati ruang, menembus ruang dan menghilang dalam ruang. Sirkulasi juga berhubungan dengan elemen penting sistem aktivitas berupa pejalan kaki dan penggunaan kendaraan.

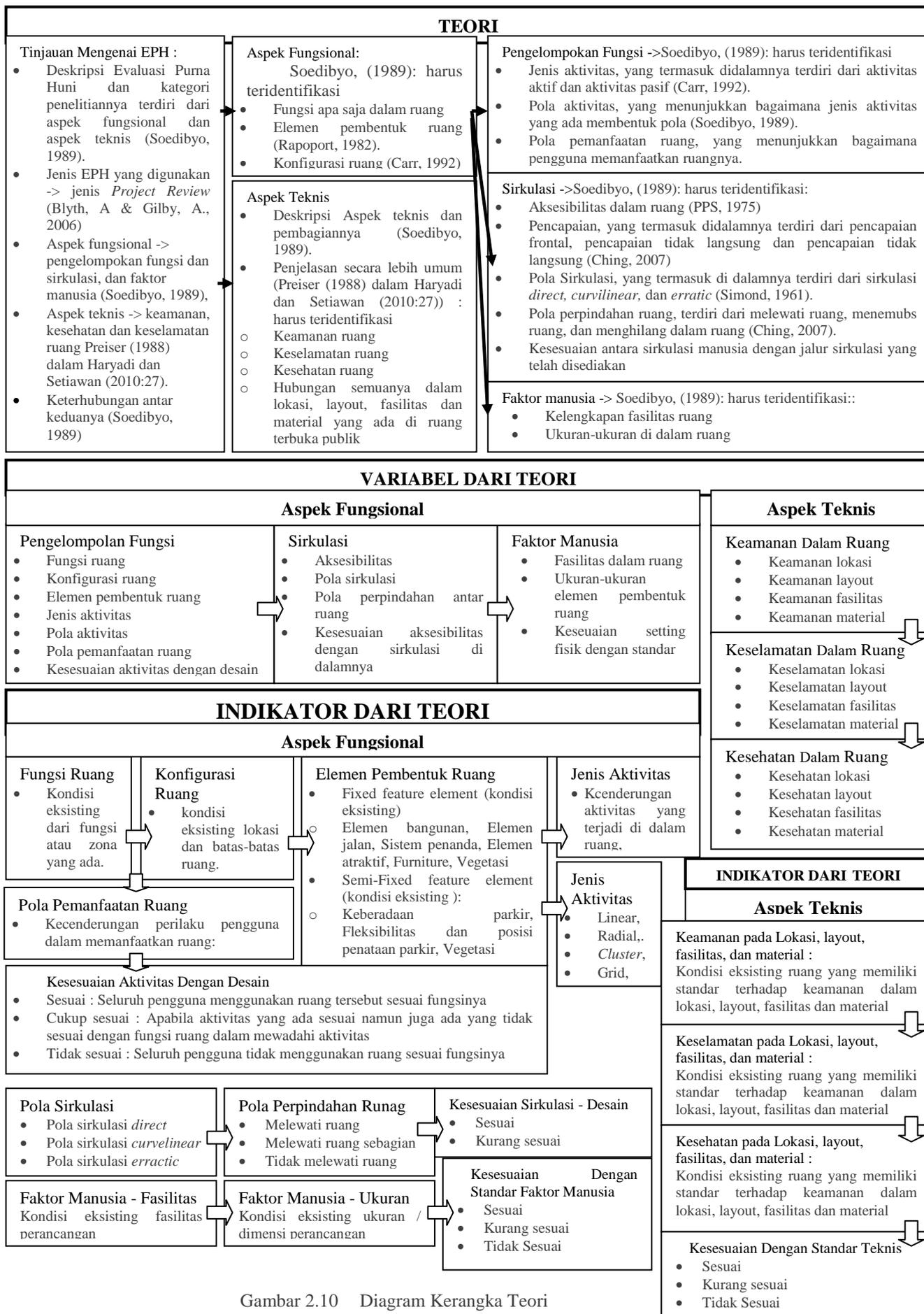
Aspek faktor manusia menggunakan metode investigatif untuk membandingkan antara kelengkapan fasilitas dan ukuran-ukuran ruang dengan literatur berupa peraturan-peraturan yang ada, sehingga dapat melihat ada tidaknya konfigurasi ataupun perancangan yang tidak sesuai dengan standar (Soedibyo, 1989). Untuk melihat kelengkapan fasilitas dan ukuran dalam ruang, maka membutuhkan kondisi eksisting tata fisik ruang yang menurut Rapoport (1982), terdiri dari *Fixed-feature element*, dan *Semifixed element*

Aspek teknis yang dikaji adalah standar bangunan dan setting fisik ruang terbuka publik yang berhubungan dengan standar terhadap keamanan, kesehatan dan keselamatan ruang yang terdapat dalam Preiser (1988) dalam Haryadi dan Setiawan (2010:27), yang mana dapat menggunakan metode evaluasi dengan pendekatan investigatif antara kondisi eksisting dengan standar yang ada untuk melihat kesesuaian ataupun ketidak sesuaian aspek teknis dilapangan dengan yang ada dalam literatur atau peraturan pemerintah yang berhubungan dengan *security, safety and health* (keamanan, keselamatan, dan kesehatan). Standar-standar ini ditujukan untuk dua pengguna alun-alun, yaitu pengguna pada umumnya, dan standar yang dikhususkan untuk masyarakat difabel.

Tinjauan studi terdahulu dipilih berdasarkan evaluasi purna huni terhadap ruang terbuka yaitu : Konsep Metafora Ruang Pada Ruang Terbuka Perkotaan "Studi Kasus : Alun-Alun Kota Malang" (2007), Faktor Penentu Setting Fisik Dalam Beraktifitas Di Ruang Terbuka Publik "Studi Kasus Alun – Alun Merdeka Kota Malang" (2013), Evaluasi Purna Huni Fasilitas pada Taman Wisata Budaya Senaputra Malang (2014).

2.6 Kerangka Teori

Kerangka teori akan memuat teori-teori yang relevan untuk menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Aspek yang disoroti dari penelitian terdiri dari tiga buah, yaitu tinjauan mengenai evaluasi purna huni, aspek fungsional, dan aspek teknis.



Gambar 2.10 Diagram Kerangka Teori

